

Judul : Tuntaskan masalah sampah, komisi XII serukan koalisi lintas sektor
Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tuntaskan Masalah Sampah Komisi XII Serukan Koalisi Lintas Sektor

SENAYAN mendukung target penanganan sampah di Indonesia dapat tuntas sepenuhnya paling lambat pada akhir 2027. Namun, diperlukan komitmen semua pihak untuk mewujudkan target tersebut.

Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo mengajak semua pihak untuk memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan target tersebut. "Target ini juga perlu didukung dengan langkah yang terukur," tegas Sartono di Jakarta, Minggu (2/8/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan permasalahan sampah sudah tuntas pada akhir 2027, sehingga tidak ada lagi gunung sampah di Indonesia. "Transformasi bangsa harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan," tegas Prabowo di kawasan Puri Delta City Side Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Sartono melanjutkan, persoalan sampah bukan hanya soal infrastruktur, tapi menyangkut perubahan perilaku masyarakat, tata kelola pemerintahan dan kolaborasi dengan dunia usaha. Karena itu, diperlukan pemetaan kondisi setiap daerah karena karakteristik timbunan sampah atau volume sampah, kapasitas fiskal, dan kesiapan infrastruktur berbeda-beda.

Menurut Sartono, keberhasilan penanganan sampah juga harus diukur melalui indikator yang jelas. Hal ini meliputi peningkatan tingkat pengurangan sampah, persentase daur ulang, dan penurunan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta penutupan praktik pembuangan terbuka.

Sartono menyebut sejumlah

langkah strategis yang bisa dilakukan. Yakni mempercepat penerapan pemilahan sampah dari sumber dan memperkuat fasilitas pengolahan di tingkat hulu, seperti Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R), dan melakukan modernisasi TPA.

Menurutnya, kerja sama lintas sektoral antar kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam keberhasilan mewujudkan target Presiden Prabowo tersebut. "Tapi dukungan atas target Presiden Prabowo tersebut perlu dibarengi dengan penguatan regulasi, kepastian anggaran hingga pengawasan yang ketat serta komitmen seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat," kata politisi Demokrat ini.

Anggota Komisi XII DPR Meitri Citra Wardani menambahkan, persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemda saja, tapi dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara kelompok masyarakat, pelaku usaha, dan warga. Caranya dengan dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti mengurangi sampah, memilah sampah sejak dari rumah, serta mendukung kegiatan bank sampah di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, para pegiat lingkungan dan aktivis bank sampah merupakan mitra strategis Pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. "Mereka tidak hanya berperan mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memberikan edukasi, membangun kebiasaan memilah sampah, dan mengembangkannya nilai ekonomi dari sampah yang masih dapat dimanfaatkan," jelasnya. ■ TIF